

## BEBAN GANDA PEREMPUAN BATAK DALAM PARTISIPASI POLITIK

**Rida Helfrida Pasaribu**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

[rhelfridapasaribu@gmail.com](mailto:rhelfridapasaribu@gmail.com)

### Abstrak

*Patriarki merupakan sistem sosial yang mengutamakan laki-laki dari pada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Budaya patriarki berkontribusi terhadap kegagalan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Patriarki menempatkan perempuan berada di posisi inferior dan superior ditempati oleh laki-laki, hal tersebut menjadikan posisi keduanya tidak sejajar. Tujuan penelitian ini melihat perspektif gender pada perempuan suku batak. Dalam struktur masyarakat patriarki, perempuan tidak akan dapat merdeka kalau tidak diberi kesempatan oleh laki-laki. Kesempatan yang diharapkan oleh perempuan tidak hanya status dan peranan, tetapi hak dalam segala aspek masyarakat seperti halnya pengambilan keputusan. Dalam Penelitian ini melihat perspektif gender perempuan suku batak dalam budaya patriarki. Penelitian ini menjelaskan kemampuan orang atau individu atau anggota suatu komunitas untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk membangun modal sosial perempuan.*

*Kata Kunci: Batak, Politik, Perempuan, Partisipasi.*

### Abstract

*Patriarchy is a social system that prioritizes men over women in a particular society or social group. Patriarchal culture contributes to the failure of women's representation in politics in Indonesia. Patriarchy places women in an inferior position and is occupied by men in a superior part, making the positions of the two unequal. The purpose of this study is to look at the gender perspective of Batak women. In a patriarchal society, women cannot be independent if men do not give the opportunity by men. Opportunities expected by women are not only status and rules but rights in all aspects of society, such as decision-making. This research looks at the gender perspective of Batak women in the patriarchal culture of seeking farmers in Samosir Regency, North Sumatra. This study explains that the ability of people, individuals or community members to involve themselves in a network of social relations is one of the keys to success in building women's social capital.*

*Keywords: Batak, Politics, Women, Participation.*

## PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.<sup>1</sup> Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Johnson, K. "2002." *Understanding Communication in Second Language Classrooms* (1990).

<sup>2</sup> Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1.1 (2018): 63-83.

<sup>3</sup> Syahfitri, Ajeng Indri, dkk. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada PT Makmur Inti Group." *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*

Di Indonesia peran gender pada perempuan adalah masih terbatas sebagai pengurus rumah tangga, perempuan tidak banyak mendapat teman dalam jaringan jika dibandingkan laki-laki yang mendominasi sebagai kepala rumah tangga.<sup>4</sup> Perempuan tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional.<sup>5</sup> Meskipun Indonesia sudah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional serta International, bahkan pada Undang-Undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>6,7</sup>

Ketika perempuan pertama kali mencalonkan diri untuk jabatan politik mereka sering diberitahu bahwa mereka harus “Lari seperti pria” karena tempat wanita dalam sejarah Amerika adalah diluar arena politik.<sup>8,9</sup> Secara khusus perempuan ditempatkan di ranah privat sebagai penjaga rumah sementara laki-laki dibagian publik termasuk didalam politik.<sup>10</sup> Bahwa pemikiran seperti ini membawa ketidak seimbangan gender antara laki-laki dan perempuan.

Bias gender juga masih menjadi perhatian yang serius dalam dunia publikasi, artinya tidak hanya pekerjaan, dalam perspektif berita juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.<sup>11</sup> Peluang dan jaringan politik disusun berdasarkan gender dan perbedaan karir politik antara pria dan wanita di Argentina, meskipun undang-undang kuota tahun 1991 membuka akses perempuan dalam jabatan politik bahwa pada penelitian ini menunjukkan jabatan politik yang lebih didambakan dan status tinggi tetap didominasi oleh laki-laki.<sup>12,13</sup>

Perempuan cenderung dilihat sebagai tambahan baru dalam politik dan juga sering dipandang sebagai orang luar dalam arena politik. Hal ini kemudian dinilai bisa bermanfaat untuk

---

(JAM) 9.2 (2019).

<sup>4</sup> Quetulio-Navarra, Melissa, Anja Znidarsic, dan Anke Niehof. "Gender Perspective on the Social Networks of Household Heads and Community Leaders after Involuntary Resettlement." *Gender, Place & Culture* 24.2 (2017): 225-246.

<sup>5</sup> Qorib, Fathul. "Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang." *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3.01 (2020): 13-22.

<sup>6</sup> Budiatri, Aisah Putri. The Role of Political Parties to Improve Women Representation in Parliament of the Republic of Indonesia and Local Legislative." *Widyariset* 15.1 (2012): 19-28.

<sup>7</sup> Putri, N. W. E. (2020). Perempuan Hindu Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender. *Communicare*, 1(1), 30-39.

<sup>8</sup> Ramadhany, Dessy, dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10.1 (2020): 39-62.

<sup>9</sup> Destemi, S., & Hartati, H. (2020, December). Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, pp. 265-268).

<sup>10</sup> Meeks, Lindsey, dan David Domke. "When Politics is a Woman's Game: Party and Gender Ownership in Woman-Versus-Woman Elections." *Communication Research* 43.7 (2016): 895-921.

<sup>11</sup> Tudor, Carissa L., dan Deborah J. Yashar. "Gender and the Editorial Process: World Politics, 2007–2017." *PS: Political Science & Politics* 51.4 (2018): 870-880.

<sup>12</sup> Franceschet, Susan, dan Jennifer M. Piscopo. "Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and Elite Political Networks in Argentina." *Comparative Political Studies* 47.1 (2014): 85-110.

<sup>13</sup> Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.

mencari perubahan status quo bahwa perempuan lebih mungkin untuk membawa perubahan daripada rekan laki-laki.<sup>14,15</sup> Secara keseluruhan, kebangkitan pemilihan umum perempuan dan kompleksitas pemilihan tersebut menciptakan ruang dinamis untuk menyelidiki bagaimana gender dan partai bertabrakan dan mempengaruhi gagasan kontemporer tentang elektabilitas dan evaluasi pemilih.

Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia tidak terlepas dari modal yang dimiliki. Kajian ini menemukan bahwa bahwa meski memperoleh kursi yang terus meningkat tapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh patriarki melalui medan pemilu.<sup>16</sup>

Di antara peranan perempuan yaitu: *Pertama*, dalam status kedudukannya berperan sebagai ibu rumah tangga, melakukan pekerjaan rumah yang merupakan bagian dari proses reproduksi pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan *Kedua*, pada posisi sebagai pencari nafkah, perempuan melakukan pekerjaan produktif yang langsung menghasilkan pendapatan. Dalam hal ini pekerjaan memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah diperhitungkan sebagai “pekerja” dengan kata produktif. Pekerjaan ini, meski pun bukan berarti “penghasilan”, tetapi mempunyai fungsi memberi dukungan bagi anggota rumah tangga lain “pencari nafkah” untuk memanfaatkan peluang kerja.<sup>17</sup> Melihat perempuan yang bekerja di sektor pertanian, bahwa peran yang mereka lakukan, tidak terbatas hanya dilihat sebagai peran domestik belaka, tetapi juga peran publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.<sup>18</sup>

Peran perempuan petani batak di desa Sitolubahal lebih mendominasi dalam pekerjaan sehari-hari baik dalam pertanian dan mengurus rumah tangga, namun praktik tradisi adat perempuan dituntut untuk taat adat yang berlaku.<sup>19</sup> Dalam hal ini relasi kerja antara suami dan istri di dalam keluarga petani adalah relasi dominasi dan secara sosial perempuan didefinisikan atas kepentingan laki-laki.<sup>20</sup> Laki-laki batak berada diposisi yang paling tinggi yaitu sebagai penerus

---

<sup>14</sup> Malihah, E. (2020). Partisipasi Politik Perempuan dalam Konstruksi Sosial Budaya Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(3), 360-373.

<sup>15</sup> Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.

<sup>16</sup> Wahdiniwaty, R., dan D. A. Rustam. "Patriarchy as a Barrier to Women Entrepreneurs in Indonesia." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 662. No. 3. IOP Publishing, 2019.

<sup>17</sup> Luthfi, Asma. "Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 2.2 (2010).

<sup>18</sup> Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 206-225.

<sup>19</sup> Silaban, Lili Tupa E. "Beban Ganda Perempuan Petani di Keluarga (Studi pada Perempuan Batak Toba di Desa Sitolubahal)." (2018).

<sup>20</sup> Aprilia, B., Surya, F. M., & Pertiwi, M. S. (2020). Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan. *Jurnal Sentris*, 1(2), 91-108.

marga dan sebagai penguasa. Perempuan berada pada posisi yang salah yaitu di bawah dan keberadaannya kurang diperhitungkan. Beban ganda perempuan Batak pada umumnya menjadi masalah yang tidak jarang terlihat.<sup>21</sup> Perempuan Batak khususnya yang berada di desa Sitolubahal setiap hari berhadapan dengan ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini diperlanggeng oleh budaya, perempuan ditundukkan dengan nilai dan norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Beban ganda perempuan Batak Petani di Desa Sitolubahal dimana perbedaan perempuan yang sudah menikah mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam melakukan pekerjaan rumah dan juga bertani.

Adanya peran ganda perempuan petani Batak di Desa Duhu Dolok dimana perempuan sebagai pengurus kebutuhan rumah tangga dan juga pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai petani, dimana petani perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga juga membiayai hidup keluarga seperti kebutuhan sekolah anak.<sup>22</sup>

Suku Batak dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat pada adat istiadat. Orang Batak tidak merasa tersinggung apabila disebut orang yang kurang taat beragama, namun sangat marah apabila disebut orang yang tidak taat akan adat istiadatnya.<sup>23</sup> Adat menjadi hal yang sangat pokok dalam kehidupan keseharian Orang Batak. Pelaksanaan adat istiadat diatur dalam sistem dalihan na tolu. Tradisi tersebut menjadi perwujudan kesenangan bagi kaum laki-laki Batak dan ketidakadilan bagi perempuan Batak dimana sistem ini berusaha mewariskannya. Perempuan dianggap sudah menjadi takdir. Laki-laki nyaman dengan sistem dalihan na tolu sehingga orang yang tidak menghargai nilai tersebut dianggap tidak menghargai adat.<sup>24</sup>

Salah satu kebudayaan Batak yang sangat dijunjung adalah Dalihan na tolu yaitu sistem kekeluargaan yang mengatur Suku Batak antara satu dengan lainnya. Dalihan secara harfiah adalah tungku, na tolu artinya yang tiga. Dengan demikian dalihan na tolu adalah tungku yang terbuat dari tiga buah batu yang dijadikan sebagai tempat memasak. Tungku (dalihan) ini dapat digunakan secara baik untuk tempat memasak karena terdiri dari tiga elemen (unsur). Demikian halnya upacara adat yang dilakukan Orang Batak berjalan dengan baik apabila ketiga unsur dalihan na tolu dapat melaksanakan peranannya masing-masing. Salah satu dari ketiga unsur ini terganggu maka upacara adat tidak sempurna. Salah satu kebudayaan diatas menjadi penghambat perempuan batak dalam melakukan kebebasan baik itu dalam hal politik dan pengambilan

---

<sup>21</sup> Hesse-Biber, Sharlene. "Mixed Methods Research: The "Thing-Ness" Problem." *Qualitative Health Research* 25.6 (2015): 775-788.

<sup>22</sup> Jalil, Iwan Abdul, dan Yurisna Tanjung. "Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1.1 (2020): 58-70.

<sup>23</sup> Muhajir, M. (2018). Tata bahasa sebagai cerminan nilai ideologis wacana politik perempuan dalam "kolom perempuan": Kajian analisis wacana kritis atas teks di harian suara merdeka. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18(1), 64-82.

<sup>24</sup> Siregar, Mangihut. *Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na tolu*. An1mage, 2017.

keputusan di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi pustaka, digunakan untuk pengkajian studi literatur. Data diperoleh dari teknik pengumpulan data menggunakan teks-teks tertulis dari buku dan jurnal.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.<sup>26</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Patriarki telah melekat dan tertanam sehingga membentuk pola pikir bahwasannya posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Sama halnya dengan Budaya pada suku Batak yang menganut prinsip *Dalihan Na Tolu* dimana lebih menjunjung pihak laki-laki dari pada perempuan. Prinsip tersebut dapat dilihat sistem kekerabatan pada masyarakat Batak masih sangat kuat, meliputi Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru. Dapat dikatakan prinsip ini lebih memihak pada laki-laki, dalam kehidupan sehari-hari prinsip ini juga masih melekat pada masyarakat Batak Toba sendiri. Dalam penelitian Simatupang disebutkan bahwa perempuan Batak di desa Sitolubahal setiap hari berhadapan dengan ketidakadilan gender.<sup>27</sup>

Ketidakadilan ini diperlanggeng oleh budaya, perempuan ditundukkan dengan nilai dan norma adat yang berlaku di dalam masyarakat. Relasi dominasi dan secara sosial perempuan didefinisikan atas kepentingan laki-laki.<sup>28</sup> Laki-laki batak berada diposisi yang paling tinggi yaitu sebagai penerus marga dan sebagai penguasa. Dalihan secara harfiah adalah tungku, na tolu artinya yang tiga. Dengan demikian dalihan na tolu adalah tungku yang terbuat dari tiga buah batu yang dijadikan sebagai tempat memasak. Tungku (dalihan) ini dapat digunakan secara baik untuk tempat memasak karena terdiri dari tiga elemen (unsur). Demikian halnya upacara adat yang dilakukan Orang Batak berjalan dengan baik apabila ketiga unsur dalihan na tolu dapat melaksanakan peranannya masing-masing. Salah satu dari ketiga unsur ini terganggu maka upacara adat tidak sempurna. Salah satu kebudayaan diatas menjadi penghambat perempuan dalam melakukan kebebasan baik itu dalam hal politik dan pengambilan keputusan di masyarakat perempuan batak khususnya di daerah Samosir yang merupakan asal usul dari masyarakat Batak.

Pada pembahasan ini maka penulis akan menggunakan teori feminisme liberal untuk

---

<sup>25</sup> Edwards, Gemma. "Mixed-Method Approaches to Social Network Analysis." (2010).

<sup>26</sup> Melfianora, M. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur." *Open Science Framework* 12.1 (2019): 14-26.

<sup>27</sup> Simatupang, Johannes B. "Perempuan dalam Budaya Adat Batak Toba." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 10288-10296.

<sup>28</sup> Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, 1(1), 75-93.

menjelaskan tentang perempuan juga bisa berada pada posisi di pemerintahan walaupun dengan budaya Patriarki yang sangat melekat mengenai perempuan itu. Perempuan itu sama dengan laki-laki dan perempuan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga mampu untuk melakukan pekerjaan diluar rumah.

Feminisme Liberal memandang bahwa perempuan memiliki kebebasan secara penuh dan individual untuk mengatur dirinya. Mereka meyakini bahwa salah satu kunci utama untuk membebaskan perempuan dan memajukan statusnya dalam masyarakat kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan memiliki kedudukan setara dengan lelaki. Kebebasan dalam arti bebas berpendapat, bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Gambaran singkat tentang perempuan dan Budaya Batak, Kaum Bapak duduk-duduk minum kopi atau tuak sepanjang hari di kedai-kedai, pulang sebentar untuk makan, kembali lagi ke warung dan tinggal di sana sepanjang hari, bercakap-cakap atau main catur dan membaca koran, dan akan pulang ke rumah sesudah larut malam. Kaum Ibu mulai pagi hari memasak di rumah, memberi anak-anak dan suami makan, mencuci pakaian, mencari uang untuk keluarga dengan bekerja di sawah atau berjualan.

Sesudah kembali dari pekerjaan mereka akan memasak, memberi makan suami dan anak-anak dan membereskan rumah. perempuan bertanggungjawab untuk seluruh pekerjaan di dalam rumah dan di luar rumah termasuk mencari uang, dan pria tidak mempunyai peran apa-apa. Perempuan Batak rela melakukan apapun demi suami dan anak-anaknya, apabila suami tidak memiliki pekerjaan maka yang banting tulang di sawah adalah isteri dan bahkan rela untuk bekerja di ladang orang untuk dapat mencukupkan kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ekonomi, peran perempuan juga sangatlah tampak, Filosofi Batak mengatakan "Anakhon hi do hamoraon di ahu" ini menandakan bahwa anak menjadi harta yang berharga buat orang Batak. Sehingga demi anak seorang ibu akan sanggup melakukan suatu pekerjaan apapun asalkan anaknya dapat makan, dan sekolah dengan baik, hal ini mungkin dapat kita rasakan dan lihat dalam hidup sekarang ini. Disuatu sisi perempuan itu sangat aktif namun yang menjadi permasalahan adalah perempuan itu dibatasi dalam suatu hal kegiatan tertentu.<sup>29</sup> Misalnya dalam acara pesta adat yang ada di dalam budaya Batak Toba saat ini, perempuan itu memang bisa untuk berperan namun dibatasi hanya sebagai pembantu suhut dalam menjalankan pesta adat tersebut. Perempuan bisa saja dipandang sebelah mata oleh kaum Adam, menganggap bahwa perempuan

---

<sup>29</sup> Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 51-66.

itu tidak bisa melakukan suatu pekerjaan tanpa laki-laki.<sup>30</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan pada Siaran Pers Nomor: B-158/SETMEN/HM.02.04/03/2022 bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik, agar tercipta kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif gender dan peduli anak untuk pembangunan yang lebih baik. “Saya berharap semakin banyak perempuan yang dapat ikut berpartisipasi di lembaga legislatif, sehingga demokrasi di Indonesia akan semakin sehat,” ujar Menteri PPPA, dalam acara Transformasi Sosial Pancasila (Kesetaraan Gender dan Kebhinekaan) pada Selasa (22/3) secara virtual.

#### A. Kemandirian

Kemampuan mandiri diperlukan perempuan yang berbudaya patriarki untuk terus maju dengan bertumpuh pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin dengan cara sumber daya manusia yang berkualitas.

Dimana masyarakat terus meningkatnya kemampuan dirinya dalam pembangunan yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

Rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung.<sup>31</sup> Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Seseorang akan mau melakukan apa saja untuk orang lain kalau ia yakin bahwa orang tersebut akan membawanya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang ia inginkan. Rasa percaya dapat membuat orang bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan orang lain tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rasa percaya tidak muncul tiba-tiba. Keyakinan pada diri seseorang atau sekelompok orang muncul dari kondisi terus menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun buatan (dikondisikan). Rasa percaya bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena rasa percaya bukan merupakan suatu hal yang absolut.

---

<sup>30</sup> Ramadhany, Dessy, dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10.1 (2020): 39-62.

<sup>31</sup> Hasbullah, Jousairi. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press, 2006.

## **B. Peningkatan Sumber Daya yang berkualitas**

Perempuan batak khususnya di daerah Samosir merupakan daerah dengan potensi sumberdaya manusia yang cukup besar. Namun demikian kuantitas sumberdaya manusia yang cukup besar kualitas sumberdaya manusia sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya pembangunan dalam hal ini perempuan ikut terlibat bahwa sumberdaya manusia merupakan aktor utama penggerak pembangunan. Oleh karena itu kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Sehingga perhatian khusus perlu diberikan dalam rangka menciptakan sumberdaya Kabupaten yang berkualitas. Kualitas sumberdaya manusia ketidaknya didukung oleh beberapa dimensi yaitu, pendidikan, kesehatan, dan tingkat keberdayaan manusia.

## **KESIMPULAN**

Budaya Patriarki telah lama lahir dan berkembang dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Samosir. Budaya Patriarki sendiri telah melekat dan tertanam dalam pemikiran manusia sehingga membentuk pola pikir bahwasannya posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Sama halnya dengan Budaya Patriarki, suku Batak Toba juga menganut prinsip Dalihan Na Tolu yang dimana lebih menjunjung pihak laki-laki dari pada perempuan. Dimana sistem kekerabatan pada masyarakat Batak masih sangat kuat dimana prinsip ini lebih memihak pada laki-laki. Pendidikan merupakan bagian krusial dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut karena pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kapasitas dan ketrampilan sumberdaya manusia. Pendidikan dalam konteks ini harus diberikan secara merata bagi setiap kelompok masyarakat. Disamping pendidikan, kesehatan juga memegang peranan penting dalam memastikan kontribusi aktif sumberdaya manusia.

Melihat kondisi tersebut, perempuan terlihat tidak memiliki posisi tawar menawar. Bahwa terjun dalam dunia politik bukan berarti menjadi anggota legislative, bupati, walikota dan presiden. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat.

Perempuan juga seharusnya wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan dan melakukan control atas keputusan politik itu sendiri. Dalam parlemen juga sangat penting perempuan mengambil keputusan public karena akan berdampak pada kualitas legislasi yang dihasilkan Lembaga negara dan publik. Keberadaan perempuan diparlemen akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai agenda nasional. Juga

membawa cara pandang perempuan yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan publik dengan berfikir holistic dan bereponsif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Bella, Florencia Maria Surya, dan Mentari Svarna Pertiwi. "Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Finitas dan Maskulinitas dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 di Jerman, Selandia Baru, dan Taiwan." *Jurnal Sentris* 1.2 (2020): 91-108.
- Basri, Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7.1 (2018): 51-66.
- Budiatri, Aisah Putri. "The Role of Political Parties to Improve Women Representation in Parliament of the Republic of Indonesia and Local Legislative." *Widyaiset* 15.1 (2012): 19-28.
- Destemi, Sutri, dan Hartati Hartati. "Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020." *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 2. 2020.
- Edwards, Gemma. "Mixed-Method Approaches to Social Network Analysis." (2010).
- Franceschet, Susan, dan Jennifer M. Piscopo. "Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and Elite Political Networks in Argentina." *Comparative Political Studies* 47.1 (2014): 85-110.
- Hasbullah, Jousairi. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press, 2006.
- Hesse-Biber, Sharlene. "Mixed Methods Research: The "Thing-Ness" Problem." *Qualitative Health Research* 25.6 (2015): 775-788.
- Jalil, Iwan Abdul, dan Yurisna Tanjung. "Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1.1 (2020): 58-70.
- Johnson, K. "2002." *Understanding Communication in Second Language Classrooms* (1990).
- Jovani, A. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. *Jurnal Inada*, 1(1), 75-93.
- Luthfi, Asma. "Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 2.2 (2010).
- Malihah, Elly. "Partisipasi Politik Perempuan dalam Kontruksi Sosial Budaya Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9.3 (2020): 360-373.
- Meeks, Lindsey, dan David Domke. "When Politics is a Woman's Game: Party and Gender Ownership in Woman-Versus-Woman Elections." *Communication Research* 43.7 (2016): 895-921.
- Melfianora, M. "Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur." *Open Science Framework* 12.1 (2019): 14-26.
- Muhajir, Muhamad. "Tata bahasa sebagai cerminan nilai ideologis wacana politik perempuan dalam "kolom perempuan": Kajian analisis wacana kritis atas teks di harian suara merdeka." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 18.1 (2018): 64-82.

- Priandi, Rizki, dan Kholis Roisah. "Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 106-116.
- Putri, Niluh Wiwik Eka. "Perempuan Hindu Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender." *Communicare* 1.1 (2020): 30-39.
- Qorib, Fathul. "Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang." *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 3.01 (2020): 13-22.
- Quetulio-Navarra, Melissa, Anja Znidarsic, dan Anke Niehof. "Gender Perspective on the Social Networks of Household Heads and Community Leaders after Involuntary Resettlement." *Gender, Place & Culture* 24.2 (2017): 225-246.
- Ramadhany, Dessy, dan Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10.1 (2020): 39-62.
- Silaban, Lili Tupa E. "Beban Ganda Petani Perempuan di Keluarga (Studi pada Perempuan Batak Toba di Desa Sitolubahal)." (2018).
- Simatupang, Johannes B. "Perempuan dalam Budaya Adat Batak Toba." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 10288-10296.
- Siregar, Mangihut. *Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na tolu*. AnImage, 2017.
- Syahfitri, Ajeng Indri, et al. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada PT Makmur Inti Group." *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)* 9.2 (2019).
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 206-225.
- Tudor, Carissa L., dan Deborah J. Yashar. "Gender and the Editorial Process: World Politics, 2007–2017." *PS: Political Science & Politics* 51.4 (2018): 870-880.
- Wahdiniwati, R., dan D. A. Rustam. "Patriarchy as a Barrier to Women Entrepreneurs in Indonesia." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. Vol. 662. No. 3. IOP Publishing, 2019.
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1.1 (2018): 63-83.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.